



KONDISI DAN MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA SEBUAH KAJIAN

Tatang Budiman

Email: gaitsaoktaviani@yahoo.com

Abstrak

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2006 diharapkan menjadi titik awal perbaikan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 %, dimana seperti yang telah diketahui pada tahun-tahun sebelumnya hanya tercapai antara 4 – 5 %. Pemerintah dalam beberapa ulasan menyebutkan kondisi yang optimis dalam memandang perekonomian pada tahun 2006, yaitu dengan sasaran menurunkan jumlah penduduk miskin maupun pengangguran terbuka. Pandangan optimis pada ini ternyata belum cukup didukung semua pihak, dimana perekonomian Indonesia masih dianggap cukup beresiko oleh analis ekonomi. Disebutkan walau cadangan devisa Indonesia tahun 2006 & 2007 sudah termasuk tinggi, antara US\$ 35 milyar s/d US\$ 50 milyar, namun belum menjamin semuanya. Permasalahan perekonomian tetap dianggap menjadi penghalang bagi bertumbuhnya ekonomi Indonesia, termasuk juga sebagai penghambat bagi pembangunan nasional & penanaman modal asing (FDI / Foreign Direct Investment). Artikel ini disebut sebagai kajian karena membahas & menyebutkan beberapa perspektif tentang topik terkait dalam hubungannya dengan artikel pendukung, laporan publik maupun jurnal ilmiah yang telah tersedia untuk diakses secara umum.

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangannya sampai dengan saat ini merupakan gambaran dari suatu proses panjang sebagai sebuah indikator efektivitas dari kinerja pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh seorang presiden beserta kabinetnya. Dengan mengacu pada artikel jurnal 'Survey on Recent Development' (Kuncoro & Resosudarmo, 2006) dan beberapa sumber serta artikel pendukung yang dimasukkan dalam referensi, maka diharapkan kajian ini dapat membahas tentang topik yang dipilih sebagai judul paper ini.

Terkait dengan kinerja dari tim ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono setelah reshuffle pada awal Desember 2006 kemarin, publik cenderung menunjukkan sentimen yang positif akan susunan yang baru. Pada artikel

Kuncoro & Resosudarmo (2006 : 8) disebutkan bahwa kecenderungan pergantian ini dilakukan adalah karena munculnya persepsi publik tentang kinerja sebelumnya yang kurang efektif dengan berbagai alasan / latar belakangnya. Bagaimanapun ada beberapa hal yang disebutkan menjadi penyebab persepsi ini, yaitu lambatnya pembayaran atau pengeluaran pemerintah berdasarkan anggaran yang direncanakan (ditunjukkan dengan angka pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi pada semester awal 2005), kondisi ini menyebabkan departemen-departemen pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat memaksimalkan utilisasi dari anggaran yang telah tersedia.

Kedua adalah kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tren yang menurun, dimana perkembangan



yang ada dan telah dicapai dinilai kecil bagi kebutuhan Indonesia akan perbaikan dan ekspansi infrastruktur. Ketiga adalah keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang tidak populer & keempat adalah adanya dugaan konflik kepentingan berhubungan dengan Aburizal Bakrie sebagai salah satu menteri anggota kabinet tim ekonomi.

Berdasarkan informasi tentang Indikator Ekonomi Indonesia (tabel 1 pada halaman berikut dapat dilihat bahwa dibalik angka-angka positif peningkatan total ekspor, cadangan devisa, kurs terhadap dolar AS yang menguat & stabil, tingkat SBI yang menurun, IHSG paling tinggi (lima tahun terakhir), peningkatan GDP, dll ada kalanya bahwa angka-angka tersebut belum dapat dijadikan sebuah indikasi penuh dari kinerja ekonomi Indonesia saat ini. Hampir sebagian besar indikator ini terlihat mengalami peningkatan termasuk pada GDP Indonesia yang pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 1.846,7 triliun namun ternyata menjelang pertumbuhannya melambat pada dua tahun terakhir (2005 – 5,6 %, 2006 – 5,48 %). Inflasi pada tahun 2005 juga mencatat rekor inflasi tertinggi pada lima tahun terakhir yaitu 17,11 % yang sangat jauh meninggalkan kisaran 4 – 6 % pada tahun-tahun yang lain.

TABEL 1.

INDIKATOR EKONOMI INDONESIA (2002 – 2006)

No	Indikator	2002	2003	2004	2005	2006
1	Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp triliun)	1.506.10	1.579.60	1.656.8	1.750.7	1.846.7
2	Pertumbuhan PDB (%)	4.38	4.89	5.13	5.6	5.48
3	Inflasi (%)	10.03	5.06	6.4	17.11	6.6
4	Total Ekspor (USD milyar)	57.0	55.6	69.7	85.57	150.69
5	Ekspor Non Migas (USD milyar)	44.9	43.1	54.1	66.22	79.52
6	Total Impor (USD milyar)	31.2	29.5	46.2	57.55	61.08
7	Impor Non Migas (Rp) milyar)	24.8	22.6	34.6	40.16	42.10
8	Neraca Perdagangan (USD milyar)	23.8	26.1	23.5	27.96	39.61
9	Neraca Transaksi Berjalan (USD milyar)	4.7	4.0	2.9	0.93	3.42 (1)
10	Cadangan Devisa (USD milyar, akhir tahun)	32.0	36.3	35.93	34.72	43.27
11	Posisi Utang Luar Negeri (USD milyar)	131.3	135.4	136.1	133.5	131.8 (2)
12	Bi. piyah/USD (Kurs Tengah Bank Indonesia)	8,940	8,330	9,355	9,830	9,020
13	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp triliun)	229.0	240.7	277.5	515.2	339.4 (4)
14	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp triliun)	244.0	258.1	306.1	542.4	559.3 (4)
15	Defisit Anggaran (Rp triliun)	-23.2	-37.7	-17.4	-26.18	-19.9 (4)
16	Utang Primer (Rp triliun)	138.3	136.5	199.7	239.8	264.5 (3)
17	Utang Sertifikat (Rp triliun)					
a. Arti Sertifikat (M2)		191.9	207.5	253.8	281.9	346.4 (4)
b. Arti Luas (M2)		883.9	911.2	1,033.50	1,203.20	1,325.7 (4)
18	Dana Pihak Ketiga Perbankan (Rp triliun)	845.0	866.3	965.1	1,134.10	1,244.9 (4)
19	Kredit Perbankan (Rp triliun)	365.4	411.7	553.6	689.7	749.9 (4)
20	Suku bunga (% ser tahun)					
a. SBI satu bulan		12.9	8.1	7.4	12.75	9.75
b. Deposito 1 bulan		12.8	7.7	6.4	11.98	8.96
c. Kredit Modal Kerja		18.3	15.8	13.4	15.92	15.07
d. Kredit Investasi		17.8	16.3	14.1	15.43	15.1
21	Persetujuan Investasi					
- Domestik (Rp triliun)		25.3	16.0	36.80	50.58	157.53 (3)
- Asing (US\$ milyar)		9.7	6.2	10.3	13.58	13.89 (2)
22	IHSG BEJ	424.9	642.5	1,002.20	1,162.50	1,405.5
23	Nilai Kapitalisasi Pasar BEJ (Rp triliun)	286.4	411.7	679.9	758.4	1,249.1

1) Invasi 1 III

2) Posisi akhir triwulan I 2005

*) dalam APBN 2005

3) Posisi akhir November 2006

4) Posisi akhir Oktober 2006

Sumber : BPS, BI & JSX (Jari Laporan Ekonomi Bulanan KADIN – 2007)

Dari analisa ‘Perkembangan Ekonomi Indonesia’ oleh KADIN pada bulan Februari 2007 disebutkan bahwa meskipun stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat dikatakan tidak efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keraguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Berkaitan dengan kenyataan ini selayaknya pemerintah segera mewaspadai kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah jangan hanya merasa aman jika stabilitas nilai tukar dapat tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan. Harus disadari bahwa kondisi sektor riil saat ini betul-betul dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan (Zetha & Tambunan, 2007).



Laporan ini lebih lanjut menyatakan bahwa meskipun perbaikan investasi belum seperti yang diharapkan, fundamental ekonomi Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat. Stabilitas makro ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kurs rupiah yang cenderung menguat, sehingga tingkat inflasi dapat terus ditekan dan suku bunga perbankan diturunkan. Kondisi ini dapat terlihat dimana selama tahun 2006 kurs rupiah mengalami apresiasi sekitar 8,2 % dan selama dua bulan pertama tahun 2007 dapat dikatakan relatif stabil pada kisaran sekitar Rp 9.100 per dollar AS. Angka inflasi yang melonjak tinggi pada tahun 2005 (17,1%) turun menjadi 6,6 % pada tahun 2006, dan diperkirakan akan terus terkendalikan selama tahun 2007. Walau demikian, ekonomi Indonesia juga disebutkan sebagai perekonomian yang beresiko seperti bom waktu dimana pada saat tertentu dimana kembali goncang masih memungkinkan terjadinya krisis moneter kedua seperti yang beberapa waktu ini cukup banyak dibicarakan kembali di media.

B. Identifikasi Masalah

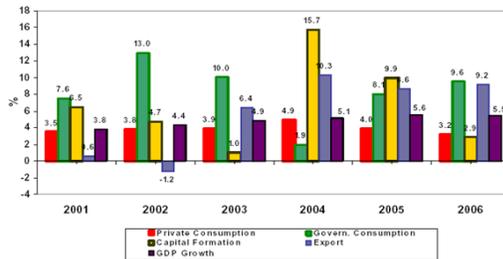
Selama ini pola pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk bercirikan consumption driven growth dibandingkan investment led growth dan kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya masih jauh dari berkualitas (Kuncoro, 2007). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan, dalam hal ini kebijakan & upaya pemerintah dalam pendapatan seperti yang digambarkan dalam GDP banyak berkontribusi melalui peningkatan konsumsi pemerintah (lihat grafik 1, 2004 – 2006), dibandingkan hasil dari manfaat pembangunan & keberhasilan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor-sektor lain yang masih rendah (lihat grafik 2) serta pembangunan seperti pada kawasan timur Indonesia yang masih

tertinggal karena sebagian besar terpusat di kawasan barat khususnya di kepulauan Jawa. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih jauh dari berkualitas adalah karena adanya indikasi trickle up effect dalam proses pembangunan di Indonesia dimana terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lebar (Kuncoro, 2007). Ketimpangan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan Gini Index yang menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada 2006 (Kuncoro, 2007). Indonesia berada pada urutan ke 68 dari sekitar 190 an negara berdasarkan informasi CIA World Factbook dengan rasio Gini 0,348 pada tahun 2007. Paul A. Vocker (mantan Dewan Direksi Bank Sentral Amerika) saat berada di Jakarta pada tanggal 21 September 2006 pernah menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai resiko bisnis dan investasi yang cukup besar di Indonesia, informasi ini dikutip dari tempo interaktif. Selain faktor itu. Vocken juga menambahkan bahwa kondisi ini juga diperburuk dengan faktor ketidakpastian hukum dan tidak efisiennya birokrasi di Indonesia. Terkait informasi ini, wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa bagi pengusaha besar asing & investor kakap AS, demokrasi merupakan faktor nomor dua sedangkan faktor yang paling dibutuhkan adalah stabilitas dan keamanan investasi, informasi ini dikutip dari Suara Karya Online.



GRAFIK 1.

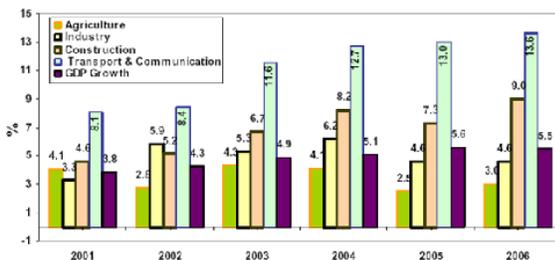
PROSENTASE PERTUMBUHAN GDP INDONESIA BERDASARKAN EXPENDITURE (2001 – 2006)



Sumber : Laporan Ekonomi Bulanan KADIN (2007)

GRAFIK 2.

PROSENTASE GDP & BEBERAPA SEKTOR EKONOMI INDONESIA (2001 – 2006)



Sumber : Laporan Ekonomi Bulanan KADIN (2007)

Dalam sebuah diskusi tentang ‘Indeks Kebebasan Ekonomi’ disebutkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki posisi sebagai mostly unfree pada urutan ke 83 dari 130 an negara yang disurvei (Perdana & Fadhil, 2006). Freedom index berusaha untuk mengukur political & civil liberties dimana unsur yang digunakan ada 4, yaitu kebebasan pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi, pertukaran sukarela yang dikoordinasi oleh pasar, kebebasan untuk masuk dan berkompetisi di pasar, serta perlindungan hak milik pribadi dari agresi orang lain (Perdana & Fadhil, 2006). Definisi kebebasan ekonomi disini adalah tidak adanya kekangan pemerintah dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi barang- barang demi melindungi kebebasan itu sendiri, intinya adalah semakin kecil peran pemerintah maka tingkat kebebasan ekonominya semakin tinggi (Perdana & Fadhil, 2006).

Dengan posisi Indonesia saat ini sebenarnya Indonesia belum cukup liberal dalam menerapkan kebijakan- kebijakan ekonomi, dimana disebutkan dalam artikel ini bahwa kurang efisien & efektifnya pengambilan keputusan dalam regulasi ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Disebutkan juga bahwa masalah lain adalah birokrasi pemerintah yang belum mendukung kebijakan regulasi ekonomi, serta masih adanya proteksi- proteksi di beberapa sektor terkait peran pemerintah sebelum krisis moneter sampai saat ini. Menurut pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) negara-negara seperti Thailand & Malaysia yang tidak dibantu IMF justru lebih cepat pulih dari krisis moneter. Donatus K. Marut (Direktur Eksekutif INFID) juga mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak bebas menentukan kebijakan dalam negeri selama masih menjalin hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, karena bagaimanapun Bank Dunia & IMF seringkali menekan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya justru memberatkan Indonesia di masa depan.

Salah satu yang dilakukan adalah menekan pemerintah merevisi UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang dianggap pro buruh dibandingkan investasi. Kalau pada akhirnya pemerintah berupaya untuk mempercepat pembayaran pinjaman pada IMF maka dapat diinterpretasikan dalam dua sudut pandang, pertama bahwa kondisi perekonomian semakin membaik dan pemerintah berupaya untuk memperlihatkan cerminan kondisi tersebut kepada dunia internasional, sedangkan kedua adalah pemerintah mengurangi resiko tekanan- tekanan tambahan dari IMF dalam merevisi atau mengubah kebijakan-kebijakan yang dimiliki saat ini.



Cadangan devisa pemerintah Indonesia 2007 diperkirakan sebesar 39,5 milyar dolar AS merupakan jumlah setelah dikurangi pelunasan pinjaman pada IMF sebesar 7,8 milyar dolar AS. Pembayaran pinjaman IMF ini dipercepat 4 tahun dari semula dan pada akhir tahun 2006 (tepatnya bulan oktober) ini telah dibayarkan sisanya sebesar 3,2 milyar dolar AS, meski cadangan devisa menurun tapi nilai tukar atau kurs rupiah terhadap USD tetap kuat (Titihewu, 2006). Pada bulan Mei 2007 ini cadangan devisa Indonesia tercatat mengalami peningkatan menjadi 50,112 milyar dolar AS berdasarkan data yang didapatkan dari website Bank Indonesia.

C. Kesimpulan

Kesimpulan tentang kondisi ekonomi Indonesia menjelang tiga tahun terakhir (2005 – 2007) seperti yang dikutip dari warta ekonomi disebutkan bahwa tahun 2006 diawali dengan keadaan yang kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan ini disebabkan karena kenaikan harga BBM yang pada Oktober 2005 yang telah menggerus daya beli masyarakat Indonesia dan menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi. Bagaimanapun kebijakan tidak populis ini adalah bagai buah simalakama bagi pemerintah karena komitmen untuk mengurangi subsidi BBM adalah salah satu agenda penting yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Walau pada akhirnya bentuk subsidi ini dialihkan ke sektor lain, namun dalam aktivitas sehari-harinya masyarakat merasa diberatkan dengan harga BBM yang terkait dengan pengeluaran rutin mereka. Laju inflasi mencapai 17,1% pada akhir 2005. Untuk menjaga agar laju inflasi menjadi lebih terkendali, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sampai 12,75% di akhir tahun 2005. Akibatnya, ekonomi nasional mengalami perlambatan secara signifikan

ketika kita memasuki tahun 2006. Menjelang tutup tahun 2006, tingkat inflasi Indonesia cenderung membaik (Tempo, 17 Desember 2006) dan SBI menembus single digit menjadi 9,75 % dibandingkan tahun sebelumnya yang masih dua digit (lihat tabel 1), inflasi pun tidak menembus double digit seperti tahun sebelumnya (lihat tabel 1). Masalah utama Indonesia adalah memburuknya sektor riil karena diterjang kenaikan harga pokok akibat masalah ekonomi termasuk pungutan daerah otonom, birokrasi dan biaya bunga tinggi, UU Pajak dan SDM yang belum mampu memikat investasi, menyikapi kondisi ini mudah-mudahan masih dapat didorong APBN dan gerakan BUMN sebagai stimulus sektor riil tahun 2007 (Majalah Infobank No. 333 tahun 2006). Stabilitas ekonomi 2006 yang membaik akan menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2007, dimana pertumbuhan diupayakan di atas 6 % (lihat tabel 1) untuk penyediaan lapangan kerja dan mengurangi jumlah orang miskin sampai 2010 (Kompas, 30 Desember 2006). Angka pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor, serta PDB diharapkan mengalami peningkatan (lihat tabel 2) dan sebagian terlihat lebih baik dibandingkan pada kuartal I tahun 2006 (kecuali pada pertumbuhan ekspor).

TABEL 2.

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 2006 – 2007 (%)

	2006					2007
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1
PDB	5.0	5.0	5.9	6.1	5.5	6.0
PDB Non Migas	5.7	5.4	6.6	6.6	6.1	6.5
Non Keuangan	5.9	5.7	6.9	6.7	6.3	6.6
Permintaan Domestik	1.0	3.0	6.4	7.6	4.5	5.4
Konsumsi	2.9	3.0	3.0	3.8	3.2	4.5
Investasi	1.1	1.1	1.3	8.2	2.9	7.5
Ekspor	11.6	11.3	8.2	6.1	9.2	8.9

Sumber : BPS (2007)

Ketika memasuki tahun 2007, perekonomian nasional sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Mulai pulihnya daya beli konsumen, prospek laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi



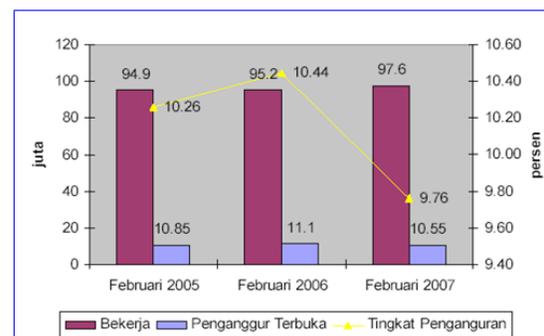
yang lebih cepat pada 2007, informasi ini dikutip dari warta ekonomi. Bagaimanapun pemerintah Indonesia tetap melihat bahwa arus investasi khususnya dari luar negeri merupakan salah satu cerminan kepercayaan akan kinerja ekonomi yang telah dilakukan selama ini. Masuknya modal asing khususnya berbentuk investasi langsung yang membangun fasilitas fisik & kebutuhan akan lapangan kerja merupakan bentuk yang lebih disukai dibandingkan investasi portofolio seperti pada saham yang mudah masuk dan mudah keluar. Disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memotivasi FDI (foreign direct investment) di Asia Tenggara, yaitu tersedianya tenaga kerja murah, tersedianya industri pendukung lokal, biaya pengiriman rendah, diversifikasi geografis, tersedianya tenaga kerja terampil dan partner lokal yang cocok atau disukai (Bartels & Freeman, 2002 ; dalam Kuncoro, 2006).

Dapat dilihat dalam latar belakang bahwa dengan kondisi investasi dalam neraca pembayaran yang cenderung pada portfolio investment dan bukan pada FDI, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan populer & tepat di lapangan untuk mendukung ini. Kendala-kendala lain secara sosial atau kultural mungkin adalah kecenderungan umum yang tidak mudah diubah dan perlu waktu lebih lama seperti sentimen anti globalisasi & rendahnya produktivitas buruh. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti yang diungkapkan Ari Kuncoro lebih lanjut adalah mencegah munculnya kabar & kesan buruk dengan menangani semua masalah secara hati-hati dan sesuai kebutuhan, melakukan verifikasi untuk setiap kabar baik yang bisa mendukung kinerja ekonomi termasuk juga penciptaan stabilitas, pencegahan relokasi perusahaan atau industri dengan membicarakannya secara 2 arah sehingga menjadi promosi yang baik akan

keseriusan pemerintah, serta perbaikan & penyelesaian masalah khususnya dalam hal tenaga kerja atau perburuhan, karena bagaimanapun investor tertarik pada net incentive bukan sekedar pemberian tax break saja. Sehubungan dengan lapangan kerja tersebut, pada grafik 3 dapat dilihat bagaimana perkembangan mengenai tingkat pengangguran di Indonesia menjelang 3 tahun terakhir (sejak Februari 2005 – Februari 2007). Pada grafik halaman berikut (grafik 3), dalam kurun waktu Februari 2005 - Februari 2007 terlihat telah terjadi penurunan jumlah penganggur terbuka sebesar 300 ribu.

Penurunan jumlah penganggur akan lebih besar jika kita membandingkan tahun lalu dimana jumlah penganggur mencapai puncaknya yaitu pada bulan Februari 2006 yaitu 11,1 juta, sehingga pada Februari 2007 jumlah penganggur terbuka menurun sebesar 550 ribu. Dengan memperhitungkan tambahan angkatan kerja baru, maka dalam 2 tahun terakhir (Februari 2007 – Februari 2005) telah tercipta 2,68 juta kesempatan kerja baru. Tambahan kesempatan kerja baru terbesar

GRAFIK 3.
PERKEMBANGAN KESEMPATAN, PENGANGGURAN & TINGKAT
PENGANGGURAN (Februari 2005 – 2007)



Sumber : Siaran Pers Pemerintah RI (15 Mei 2006)

Selain lapangan kerja, masih perlu diberikan perhatian lebih tentang kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu perlu diadakan harmonisasi antara kementerian



perdagangan & industri bersama dengan kementerian tenaga kerja, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat aspek- aspek hukum untuk menghindari ketidakpastian, pengembangan infrastruktur, serta perlu adanya pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dimana ada persetujuan atau kesepakatan sendiri antara perusahaan dan pekerja. Program jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun kredibilitas melalui penciptaan image positif dalam bidang ketenagakerjaan dan aspek legal upaya hukum, program kedua adalah mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Upaya pemerintah saat ini dengan melakukan pengkajian atas peraturan-peraturan daerah dan penghapusan atas kebijakan yang tidak efektif menjadi awal yang baik, kondisi ini juga didukung oleh upaya dari sektor pajak untuk menerapkan konsep 'pajak yang terbuka', dimana wajib pajak dapat langsung terhubung secara online dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Otomatis ini juga akan mengurangi 'hubungan' yang tidak perlu antara petugas pajak dan wajib pajak. Kendala yang mungkin muncul adalah knowledge gap yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan metode yang terotomatisasi ini serta metode yang berkaitan dengan koneksi internet untuk dapat menjalankannya secara tepat. Dukungan, penginformasian & penjelasan yang tepat tentang hal ini kelak akan memberikan manfaat lebih untuk perpajakan Indonesia jangka panjang.

REFERENSI

- Harian Kompas*, 30 Desember 2006. "Pertumbuhan Belum Cukup Selesaikan Masalah".
- Harian Tempo, 17 Desember 2006. "Prospek Ekonomi & Politik 2007". International Monetary Fund / IMF. (2007). 'GDP by Countries'.
- World Economic Outlook Database. Kuncoro, A & Resosudarmo, B, P. (2006). 'Survey of Recent Development'.
- Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 42, No. 1, pp 7 – 31. Kuncoro, A. (2006). 'Problems in Indonesian Economy (Macroeconomics Understanding The Wealth of Nations)'.
- Kuncoro, M. (2007). 'Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas?'. Investor Daily. Majalah Infobank No. 333, Desember 2006.
- Perdana, A & Fadhil, H. (2006). 'Diskusi Indeks Kebebasan Ekonomi (Index of Economic Freedom) – Freedom Institute & Fraser Institute'. Heritage Foundation & Street Journal.
- Siaran Pers Pemerintah Republik Indonesia. (2007). 'PENJELASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008 : Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Jumlah Pengangguran Kuartal I 2007 Mengkonfirmasi Percepatan Pertumbuhan Sektor Riil yang Berkelanjutan'. 15 Mei 2007.
- Titihieruw, I. (2006). 'Tinjauan Perkembangan Ekonomi – Perkembangan Ekonomi Makro (Desember 2006)'. Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
- Website BANK INDONESIA (www.bi.go.id)
- Website BADAN PUSAT STATISTIK (www.bps.go.id) Website SUARA KARYA ONLINE (www.suarakarya-online.com)



Website TEMPO INTERAKTIF
(www.tempointeraktif.com)

Website WARTA EKONOMI (www.wartaekonomi.com)

*Zetha, E & Tambunan, T. (2007).
'Perkembangan Ekonomi Indonesia –
Analisa Bulanan (Februari 2007)'.
Kamar Dagang & Industri (KADIN)
Indonesia.*